



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi maka perlu pengaturan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
-

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah;
-

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Kabupaten Kutai Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mengelola dana APBD.
6. Tenaga Honorar adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kutai Timur yang ditugaskan pada SKPD dan anggarannya dialokasikan pada DPA SKPD yang bersangkutan.

7. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kilometer dari batas kota yang dilakukan untuk kepentingan negara atau perintah pejabat yang berwenang.
 8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kabupaten Kutai Timur baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Pejabat yang Berwenang termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan lain di Kabupaten Kutai Timur ke Kabupaten Kutai Timur.
 9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
 10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 12. Uang kontribusi adalah uang pelatihan yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan penginapan selama mengikuti pelatihan.
 13. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka dalam rangka perjalanan dinas.
 14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorir untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
 17. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
 18. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas tujuan.
-

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas daerah diberikan :
 - a. Uang harian yang meliputi uang saku dan transport lokal;
 - b. Uang representasi;
 - c. Biaya transportasi udara;
 - d. Biaya transportasi darat;
 - e. Biaya hotel/penginapan.
- (2) Lamanya perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penuh maksimal 5 (lima) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) dikecualikan bila terjadi sesuatu mengakibatkan harus melakukan perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) hari kerja dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

- (1) Besarnya uang saku dan transport lokal (Uang Harian), uang representasi transportasi udara, transportasi darat dan biaya hotel/penginapan Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer diatur dalam lampiran I pada Peraturan Bupati ini.
 - (2) Besarnya uang saku dan transport lokal (Uang Harian), uang representasi transportasi udara, transportasi darat dan biaya hotel/penginapan pejabat fungsional ahli setara dengan pejabat eselon III, sedangkan pejabat fungsional trampil setara dengan pejabat eselon IV, kemudian diatur dalam lampiran II pada Peraturan Bupati ini.
-

Pasal 5

- (1) Bagi PNS eselon II yang ditugaskan mewakili Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi PNS eselon III yang ditugaskan mewakili eselon II diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Eselon II.
- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan atau konsultasi.

Pasal 6

- (1) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang telah membayar biaya pelatihan diberikan perjalanan dinas selama (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.
- (2) Untuk selebihnya diberikan uang harian sesuai pasal 4 ayat (1) selama mengikuti pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional lebih dari 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pada kegiatan tertentu Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah.
 - (2) Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Ajudan dan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah mengikuti ketentuan yang dalam Peraturan Bupati ini.
-

Pasal 8

- (1) Pembayaran uang harian, uang representasi dan biaya hotel/penginapan bagi Pejabat Negara, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer dilakukan secara lumpsum.
- (2) Pembayaran uang transportasi udara dan transportasi darat Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan tenaga honorer dilakukan dengan sistem biaya riil.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan route yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Pelampauan dari jumlah hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 10

- (1) Kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan :
 - a. Uang harian;
 - b. Uang representasi;
 - c. Biaya transport;
-

d. Biaya hotel/penginapan.

Pasal 11

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan diatur pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan untuk pejabat fungsional ahli setara dengan pejabat eselon III, sedangkan untuk pejabat fungsional trampil setara dengan pejabat eselon IV, yang kemudian diatur dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran uang harian, uang representasi dan biaya hotel/penginapan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer dilakukan secara lumpsum.
- (2) Pembayaran uang transportasi Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, dan Anggota DPRD dan tenaga honorer dilakukan dengan sistem biaya riil.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transportasi yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka kelebihan harga tidak diperhitungkan dalam biaya transportasi.

BAB IV

PERJALANAN DINAS MENJEMPUT/MENGANTARKAN JENAZAH

Pasal 13

- (1) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas.

- (2) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Biaya untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana diatur pada lampiran IV pada Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
 - a. Biaya pemctian;
 - b. Biaya angkutan jenazah;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah PNS dan Tenaga Honorer yang telah melakukan perjalanan dinas SPPDnya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan SPPD untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (4) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat disahkan oleh Pengg Anggaran/Kepala SKPD dan eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi.
- (6) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer I Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat/Kantor/UPT disahkan oleh pejabat eselon III yang menjadi atasan langsung.

- (7) Eselon IV, pada Sekretariat daerah disahkan oleh pejabat eselon III yang menjadi atasan langsung.
- (8) PNS Non Eselon dan Tenaga Honorer pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 15

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
 - (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - c. Bukti kuitansi transport seperti karcis, tiket pesawat dan boarding pass
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas;
 - e. Laporan perjalanan dinas.
 - (4) Jika bukti sebagaimana pada ayat (3) huruf c tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya, maka wajib membuat pernyataan kebenaran pengeluaran biaya transportasi riil.
 - (5) Format pernyataan kebenaran pengeluaran biaya transportasi riil sebagaimana ayat (4) diatur pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - (6) Selisih biaya transport perjalanan dinas yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.
 - (7) Format rincian biaya perjalanan dinas diatur pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
-

Pasal 16

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah ada sebelumnya dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangata
pada tanggal 29 Desember 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO.	TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL/LAUT	KERETA API/BUS	LA
1	2	3	4	5	
1	Tingkat A untuk Pejabat Negera seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Setingkat Menteri	BISNIS	KELAS 1A/VIP	Spesial / Eksekutif	Men
2	Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya Seperti Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Propinsi, Ketua ,Wakil Ketu, Anggota DPRD Kabupaten, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Eselon I.	BISNIS	KELAS I B	Eksekutif	Men
3	Tingkat C untuk Pejabat Eselon II	EKONOMI	KELAS I B	Eksekutif	Men
4	Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Men
5	Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Men
6	Tingkat F untuk Golongan II, I dan Honorer	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Men

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. UANG HARIAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	Transport Lokal	Uang Saku	Uang Harian
1	2	3	4	5=3+4
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,000	300,000	390,000
2.	SUMATERA UTARA	70,000	300,000	370,000
3.	RIAU	60,000	300,000	360,000
4.	KEPULAUAN RIAU	90,000	300,000	390,000
5.	J A M B I	60,000	300,000	360,000
6.	SUMATERA BARAT	120,000	300,000	420,000
7.	SUMATERA SELATAN	90,000	300,000	390,000
8.	LAMPUNG	100,000	300,000	400,000
9.	BENGKULU	80,000	300,000	380,000
10.	BANGKA BELITUNG	60,000	300,000	360,000
11.	BANTEN	160,000	300,000	460,000
12.	JAWA BARAT	60,000	350,000	410,000
13.	D.K.I. JAKARTA	160,000	450,000	610,000
14.	JAWA TENGAH	50,000	300,000	350,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	60,000	350,000	410,000
16.	JAWA TIMUR	120,000	350,000	470,000
17.	BALI	100,000	400,000	500,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	50,000	350,000	400,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	70,000	350,000	420,000
20.	KALIMANTAN BARAT	90,000	300,000	390,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	70,000	300,000	370,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	90,000	300,000	390,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	280,000	350,000	630,000
24.	SULAWESI UTARA	110,000	300,000	410,000
25.	GORONTALO	80,000	300,000	380,000
26.	SULAWESI BARAT	125,000	300,000	425,000
27.	SULAWESI SELATAN	110,000	350,000	460,000
28.	SULAWESI TENGAH	40,000	300,000	340,000
29.	SULAWESI TENGGARA	90,000	300,000	390,000
30.	MALUKU	170,000	300,000	470,000
31.	MALUKU UTARA	110,000	300,000	410,000
32.	PAPUA	260,000	450,000	710,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	110,000	400,000	510,000

B. UANG HARIAN KABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

NO	Kabupaten /Kota	Transport Lokal	Uang Saku	Uang Harian
1	2	3	4	5=3+4
1	TARAKAN	75,000	350,000	425,000
2	MALINAU	75,000	350,000	425,000
3	NUNUKAN	75,000	350,000	425,000
4	BULUNGAN	75,000	350,000	425,000
5	BERAU	75,000	350,000	425,000
6	KUTAI BARAT	75,000	350,000	425,000
7	KUTAI KARTANEGARA	75,000	350,000	425,000
8	KUTAI TIMUR	75,000	350,000	425,000
9	BONTANG	75,000	350,000	425,000
10	BALIKPAPAN	100,000	350,000	450,000
11	SAMARINDA	100,000	350,000	450,000
12	PASER	75,000	350,000	425,000
13	PENAJAM PASER UTARA	75,000	350,000	425,000

C. UANG REPRESENTASI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	REPRESENTASI PER HARI					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,768,000	1,496,000	425,000	379,000	160,000	
2.	SUMATERA UTARA	1,800,000	1,000,000	330,000	275,000	155,000	
3.	RIAU	1,380,000	1,200,000	335,000	316,000	155,000	
4.	KEPULAUAN RIAU	1,364,000	1,100,000	275,000	244,000	147,000	
5.	J A M B I	1,600,000	858,000	330,000	280,000	144,000	
6.	SUMATERA BARAT	1,696,000	1,400,000	339,000	300,000	144,000	
7.	SUMATERA SELATAN	1,800,000	1,100,000	330,000	250,000	155,000	
8.	LAMPUNG	1,320,000	1,200,000	300,000	264,000	132,000	
9.	BENGKULU	1,100,000	700,000	290,000	260,000	191,000	
10.	BANGKA BELITUNG	1,000,000	900,000	270,000	250,000	132,000	
11.	BANTEN	1,300,000	1,100,000	396,000	350,000	175,000	
12.	JAWA BARAT	1,300,000	1,200,000	415,000	396,000	171,000	
13.	D.K.I. JAKARTA	3,488,000	1,200,000	330,000	325,000	195,000	
14.	JAWA TENGAH	1,620,000	1,400,000	375,000	363,000	175,000	
15.	D.I. YOGYAKARTA	1,500,000	1,000,000	330,000	275,000	187,000	
16.	JAWA TIMUR	1,516,000	1,300,000	316,000	300,000	152,000	
17.	B A L I	1,804,000	1,500,000	550,000	418,000	125,000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1,000,000	900,000	330,000	275,000	175,000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1,200,000	986,000	330,000	275,000	183,000	
20.	KALIMANTAN BARAT	1,300,000	1,100,000	370,000	273,000	168,000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	1,200,000	1,100,000	375,000	330,000	155,000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	1,700,000	1,000,000	350,000	330,000	195,000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	1,600,000	1,000,000	375,000	352,000	215,000	
24.	SULAWESI UTARA	1,280,000	1,100,000	409,000	300,000	195,000	
25.	GORONTALO	1,000,000	875,000	330,000	270,000	160,000	
26.	SULAWESI BARAT	900,000	725,000	270,000	220,000	155,000	
27.	SULAWESI SELATAN	1,600,000	1,100,000	400,000	297,000	163,000	
28.	SULAWESI TENGAH	1,000,000	900,000	333,000	255,000	155,000	
29.	SULAWESI TENGGARA	1,000,000	900,000	300,000	297,000	175,000	
30.	MALUKU	1,200,000	1,000,000	336,000	300,000	152,000	
31.	MALUKU UTARA	1,244,000	1,000,000	429,000	300,000	140,000	
32.	PAPUA	1,140,000	1,000,000	346,000	305,000	180,000	
33.	IRIAN JAYA BARAT	1,800,000	1,300,000	450,000	346,000	155,000	

D. UANG REPRESENTASI KABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN / KOTA	REPRESENTASI PER HARI					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TARAKAN	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
2	MALINAU	1,100,000	935,000	275,000	267,000	161,000	70
3	NUNUKAN	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
4	BULUNGAN	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
5	BERAU	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
6	KUTAI BARAT	1,100,000	935,000	275,000	267,000	161,000	70
7	KUTAI KARTENEGARA	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
8	KUTAI TIMUR	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
9	BONTANG	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
10	BALIKPAPAN	1,600,000	1,000,000	380,000	375,000	240,000	112
11	SAMARINDA	1,600,000	1,000,000	380,000	375,000	240,000	112
12	PASER	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75
13	PENAJAM PASER UTARA	1,400,000	1,020,000	320,000	300,000	174,000	75

E. BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE (A)	BINTANG LIMA (B)	BINTANG EMPAT (C)	BINTANG TIGA (D)	BINTANG DUA (E)	BINTANG SATU (F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4,420,000	1,760,000	1,150,000	850,000	410,000	250,000
2.	SUMATERA UTARA	4,500,000	1,250,000	1,000,000	550,000	400,000	290,000
3.	RIAU	3,450,000	1,650,000	960,000	670,000	400,000	340,000
4.	KEPULAUAN RIAU	3,410,000	1,500,000	740,000	550,000	380,000	250,000
5.	J A M B I	4,000,000	1,010,000	1,000,000	560,000	370,000	230,000
6.	SUMATERA BARAT	4,240,000	1,750,000	1,030,000	600,000	370,000	280,000
7.	SUMATERA SELATAN	4,500,000	1,350,000	1,000,000	500,000	400,000	280,000
8.	LAMPUNG	3,300,000	1,700,000	800,000	600,000	340,000	260,000
9.	BENGKULU	1,300,000	920,000	790,000	580,000	490,000	400,000
10.	BANGKA BELITUNG	2,000,000	1,100,000	820,000	500,000	340,000	300,000
11.	BANTEN	3,250,000	1,630,000	1,200,000	700,000	450,000	290,000
12.	JAWA BARAT	3,250,000	1,650,000	1,200,000	830,000	440,000	330,000
13.	D.K.I. JAKARTA	8,720,000	1,650,000	1,000,000	650,000	500,000	400,000
14.	JAWA TENGAH	4,050,000	1,650,000	1,100,000	750,000	450,000	280,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	3,750,000	1,250,000	1,000,000	550,000	480,000	280,000
16.	JAWA TIMUR	3,790,000	1,560,000	960,000	600,000	390,000	280,000
17.	B A L I	4,510,000	2,280,000	1,450,000	1,100,000	800,000	500,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2,400,000	1,200,000	1,000,000	550,000	450,000	300,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,160,000	1,000,000	550,000	470,000	400,000
20.	KALIMANTAN BARAT	2,400,000	1,400,000	830,000	740,000	430,000	300,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	3,000,000	1,300,000	1,000,000	750,000	400,000	290,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000	1,400,000	1,200,000	700,000	500,000	350,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	1,500,000	1,230,000	750,000	550,000	450,000
24.	SULAWESI UTARA	3,200,000	1,380,000	1,240,000	600,000	500,000	290,000
25.	GORONTALO	1,320,000	1,030,000	820,000	660,000	410,000	240,000
26.	SULAWESI BARAT	1,050,000	850,000	670,000	540,000	400,000	360,000
27.	SULAWESI SELATAN	4,000,000	1,400,000	900,000	800,000	420,000	330,000
28.	SULAWESI TENGAH	2,030,000	1,210,000	1,010,000	510,000	400,000	330,000
29.	SULAWESI TENGGARA	1,850,000	1,200,000	900,000	600,000	450,000	350,000
30.	MALUKU	3,000,000	1,200,000	1,020,000	600,000	390,000	280,000
31.	MALUKU UTARA	3,110,000	1,400,000	1,300,000	600,000	360,000	330,000
32.	PAPUA	2,850,000	1,600,000	1,050,000	610,000	460,000	380,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	4,500,000	1,580,000	1,050,000	900,000	400,000	370,000

F. BIAYA PENGINAPAN SEKABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten / Kota	TARIF HOTEL KELAS SUITE (A)	BINTANG LIMA (B)	BINTANG EMPAT (C)	BINTANG TIGA (D)	BINTANG DUA (E)	BINTANG SATU (F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TARAKAN	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
2	MALINAU	2,750,000	1,100,000	750,000	550,000	350,000	275,000
3	NUNUKAN	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
4	BULUNGAN	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
5	BERAU	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
6	KUTAI BARAT	2,750,000	1,100,000	750,000	550,000	350,000	275,000
7	KUTAI KARTENEGARA	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
8	KUTAI TIMUR	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
9	BONTANG	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
10	BALIKPAPAN	4,000,000	1,500,000	1,230,000	750,000	550,000	450,000
11	SAMARINDA	4,000,000	1,500,000	1,230,000	750,000	550,000	450,000
12	PASER	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
13	PENAJAM PASER UTARA	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000

G. BIAYA TRASPORTASI UDARA

No.	Jalur Transportasi	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi
		Pergi Pulang (Pp)	Pergi - Pulang (Pp)
1	2	3	4
1	Balikpapan - Banda Aceh	9,465,000	6,310,000
2	Balikpapan - Medan	8,610,000	5,740,000
3	Balikpapan - Pekanbaru	7,605,000	5,070,000
4	Balikpapan - Batam	7,440,000	4,960,000
5	Balikpapan - Pangkal Pinang	6,495,000	4,330,000
6	Balikpapan - Jambi	6,180,000	4,120,000
7	Balikpapan - Padang	7,530,000	5,020,000
8	Balikpapan - Palembang	6,660,000	4,440,000
9	Balikpapan - Lampung	5,790,000	3,860,000
10	Balikpapan - Bengkulu	6,240,000	4,160,000
11	Balikpapan - Jakarta	5,325,000	3,550,000
12	Balikpapan - Banten	5,325,000	3,550,000
13	Balikpapan - Semarang	6,555,000	4,370,000
14	Balikpapan - Bandung	5,820,000	3,880,000
15	Balikpapan - Jogjakarta	6,660,000	4,440,000
16	Balikpapan - Surabaya	2,925,000	1,950,000
17	Balikpapan - Denpasar	4,275,000	2,850,000
18	Balikpapan - Mataram	7,222,500	4,815,000
19	Balikpapan - Kupang	7,725,000	5,150,000
20	Balikpapan - Pontianak	7,725,000	5,150,000
21	Balikpapan - Palangkaraya	7,282,500	4,855,000
22	Balikpapan - Banjarmasin	2,812,500	1,875,000
23	Balikpapan - Makassar	3,225,000	2,150,000
24	Balikpapan - Kendari	3,814,500	2,543,000
25	Balikpapan - Mamuju	3,964,500	2,643,000
26	Balikpapan - Palu	2,688,750	1,792,500
27	Balikpapan - Manado	3,750,000	2,500,000
28	Balikpapan - Gorontalo	4,376,250	2,917,500
29	Balikpapan - Ambon	5,490,000	3,660,000
30	Balikpapan - Ternate	5,865,000	3,910,000
31	Balikpapan - Timika	10,837,500	7,225,000
32	Balikpapan - Monokwari	12,435,000	8,290,000
33	Balikpapan - Tarakan	2,295,000	1,530,000
34	Balikpapan - Nunukan	3,195,000	2,130,000
35	Balikpapan - Malinau	3,000,000	2,000,000
36	Balikpapan - Bulungan	2,625,000	1,750,000
37	Balikpapan - Berau	2,250,000	1,500,000

H. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

N0	Uraian	Transportasi (PP)
1	2	4
1	TARAKAN	-
2	MALINAU	-
3	NUNUKAN	-
4	TANAH TIDUNG	1,250,000
5	BULUNGAN	1,200,000
6	BERAU	1,000,000
7	KUTAI BARAT	700,000
8	KUTAI KARTENEGARA	300,000
9	BONTANG	150,000
10	BALIKPAPAN	400,000
11	SAMARINDA	250,000
12	PASER	600,000
13	PENAJAM PASER UTARA	500,000

Ketentuan :

- Biaya Transportasi di atas hanya berlaku bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat)

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

A. UANG HARIAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR TIMUR

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	2	3
1	SANGATTA UTARA	200,000
2	SANGATTA SELATAN	100,000
3	TELUK PANDAN	100,000
4	RANTAU PULUNG	100,000
5	BENGALON	100,000
6	KALIORANG	100,000
7	KAUBUN	100,000
8	SANGKULIRANG	200,000
9	MUARA WAHAU	200,000
10	KONGBENG	200,000
11	MUARA BENGKAL	200,000
12	MUARA ANCALONG	250,000
13	LONG MESANGAT	250,000
14	BATU AMPAR	250,000
15	TELEN	250,000
16	KARANGAN	325,000
17	BUSANG	325,000
18	SANDARAN	350,000

B. UANG REPRESENTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	Kecamatan	REPRESENTASI PER HARI					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	SANGATTA UTARA	1,400,000	1,000,000	500,000	300,000	140,000	75,000
2	SANGATTA SELATAN	1,400,000	340,000	262,000	150,000	87,500	50,000
3	TELUK PANDAN	1,400,000	300,000	225,000	125,000	70,000	38,000
4	RANTAU PULUNG	1,400,000	300,000	225,000	125,000	70,000	38,000
5	BENGALON	1,400,000	300,000	225,000	125,000	70,000	38,000
6	KALIORANG	1,400,000	300,000	225,000	125,000	70,000	38,000
7	KAUBUN	1,400,000	300,000	225,000	125,000	70,000	38,000
8	SANGKULIRANG	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
9	MUARA WAHAU	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
10	KONGBENG	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
11	MUARA BENGKAL	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
12	MUARA ANCALONG	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
13	LONG MESANGAT	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
14	BATU AMPAR	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
15	TELEN	1,400,000	319,000	244,000	137,000	78,000	44,000
16	KARANGAN	1,400,000	255,000	188,000	100,000	53,000	25,000
17	BUSANG	1,400,000	255,000	188,000	100,000	53,000	25,000
18	SANDARAN	1,400,000	255,000	188,000	100,000	53,000	25,000

C. BIAYA TRANSPORTASI DALAN WILAYAH KUTAI TIMUR

No.	KECAMATAN	TRANSPORTASI IOT/PP	BANTUAN SURVEY (Rp/Paket)
1	2	3	4
1.	SANGATTA - SANGATTA UTARA	-	50,000
2.	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	80,000	100,000
3.	SANGATTA - TELUK PANDAN	100,000	150,000
4.	SANGATTA - RANTAU PULUNG	300,000	150,000
5.	SANGATTA - BENGALON	300,000	150,000
6.	SANGATTA - KALIORANG	500,000	200,000
7.	SANGATTA - KAUBUN	550,000	200,000
8.	SANGATTA - SANGKULIRANG	800,000	200,000
9.	SANGATTA - MUARA WAHAU	800,000	200,000
10.	SANGATTA - KONGBENG	800,000	200,000
11.	SANGATTA - MUARA BENGKAL	1,300,000	200,000
12.	SANGATTA - MUARA ANCALONG	1,300,000	200,000
13.	SANGATTA - LONG MESANGAT	1,400,000	200,000
14.	SANGATTA - BATU AMPAR	1,400,000	200,000
15.	SANGATTA - TELEN	1,000,000	200,000
16.	SANGATTA - KARANGAN	2,000,000	300,000
17.	SANGATTA - BUSANG	3,000,000	300,000
18.	SANGATTA - SANDARAN	3,500,000	300,000

Ketentuan :

- 1 Biaya Transportasi di atas merupakan biaya perjalanan Pergi - Pulang dari Ibukota Kabupaten menuju ibukota Kecamatan
- 2. Biaya Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan menuju Wilayah Pedesaan untuk jarak lebih dari 10 Km, dan diberikan dalam bentuk paket/lumpsum

D. BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	Kecamatan	TINGKATAN PERJALANAN DINAS					
		A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SANGATTA UTARA	3,500,000	1,200,000	900,000	600,000	400,000	300,000
2	SANGATTA SELATAN	3,500,000	400,000	350,000	300,000	250,000	200,000
3	TELUK PANDAN	3,500,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
4	RANTAU PULUNG	3,500,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
5	BENGALON	3,500,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
6	KALIORANG	3,500,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
7	KAUBUN	3,500,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
8	SANGKULIRANG	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
9	MUARA WAHAU	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
10	KONGBENG	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
11	MUARA BENGKAL	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
12	MUARA ANCALONG	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
13	LONG MESANGAT	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
14	BATU AMPAR	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
15	TELEN	3,500,000	375,000	325,000	275,000	225,000	175,000
16	KARANGAN	3,500,000	300,000	250,000	200,000	150,000	100,000
17	BUSANG	3,500,000	300,000	250,000	200,000	150,000	100,000
18	SANDARAN	3,500,000	300,000	250,000	200,000	150,000	100,000

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISHAN NOOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Biaya Pemetaan	Pengangkutan
1	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Kabupaten,	4,000,000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Pejabat Eselon II	3,000,000	
3	Pejabat Eselon III/Golongan IV	2,500,000	
4	Pejabat Eselon IV/Golongan III	2,500,000	
5	PNS Golongan II dan I	2,500,000	

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA TRANSPORTASI RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, No dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran meliputi :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengata, 20..

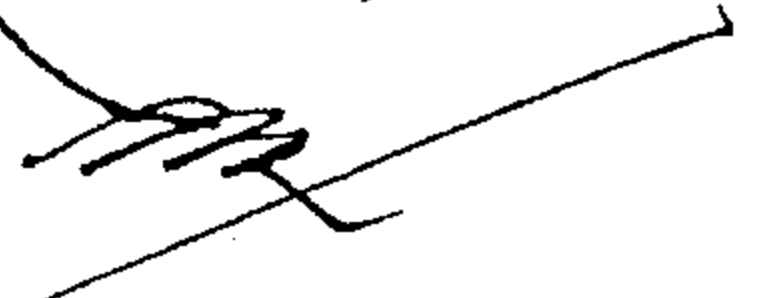
Mengetahui/Menyetujui :
PA/KPA,

Pegawai Negara/Pegawai Negeri Sipil
Yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Jumlah		
Terbilang :			

.....20...

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima,

.....
Nip.....

.....
Nip.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa Kurang/Lebih : Rp.....

Mengetahui/menyetujui,
PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Nip.....

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR